



ANALISIS DETERMINAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DI KALIMANTAN TIMUR

*Parno¹

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

*Alamat Korespondensi: parno82@kemenkeu.go.id

Abstract

This study aims to analyze the determinants of budget execution performance of spending units in East Kalimantan. Budget execution, as an exogenous variable, is proxied by goods and services procurement, external factors, and activity implementation. The analysis model for budget execution performance is constructed using the Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS) method. The results showed that the exogenous variable of goods and services procurement significantly influences activity implementation. However, goods and services procurement and external factors directly do not have a significant impact on budget execution performance. Conversely, goods and services procurement through the implementation of activities demonstrates a significant effect on budget execution performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di Kalimantan Timur. Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagai variabel eksogen diukur dengan pengadaan barang dan jasa, faktor eksternal dan pelaksanaan kegiatan. Model analisis kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan metode *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel eksogen pengadaan barang jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan. Variabel eksogen pengadaan barang jasa dan faktor eksternal secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Namun pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Keywords: pengukuran kinerja, kinerja pelaksanaan anggaran, SEM PLS

JEL Classification: H110

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan RI (2023a) menetapkan anggaran belanja untuk membiayai kegiatan Pemerintah Pusat dalam satu tahun anggaran mencapai

angka Rp2.246,5 triliun. Sejumlah anggaran tersebut ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2023.



APBN yang telah disetujui dan disahkan DPR, kemudian dituangkan ke dalam dokumen untuk dilaksanakan Pemerintah, atau yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam hal ini satuan kerja K/L untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Dengan demikian, pada tahapan siklus APBN pelaksanaan anggaran, K/L melakukan kegiatan dan program yang telah ditentukan dalam DIPA. Anggaran belanja sebesar itu harus dikelola dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu komponen dalam prinsip *good governance* yang menjadi syarat unit kerja pemerintah dalam mewujudkan visi misi organisasi. Bahkan, Presiden Republik Indonesia (RI) mengeluarkan instruksi supaya setiap unit kerja pemerintah menyusun akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok yang diemban dan fungsi yang dilaksanakan satuan unit kerja milik pemerintah. Selain itu, juga sebagai upaya dan usaha pertanggungjawaban atas kinerja unit kerja pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap penggunaan atau pemanfaatan *resource* yang berada pada kendali unit kerja pemerintah tersebut.

Kiri & Handayani (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas publik termasuk prinsip utama dan terdepan dalam mencapai kinerja pemerintah yang baik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan informasi penyampaian

kegiatan kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah kepada *stakeholder*. Kiri & Handayani (2021) juga memberikan penekanan bahwa terdapat isu terkait kinerja pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat belum merasakan hasil kerja pemerintah secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menilai kinerja pemerintah tidak baik. Baik buruknya kinerja pemerintah, dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut. Untuk mengetahui kinerja pemerintah dan berbagai faktor pendukung yang memengaruhinya, penelitian ini menggunakan proksi kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah, dalam hal ini kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagai unit kerja pemerintah. Penelitian Kuntadi & Puspita (2022) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dukungan yang diberikan organisasi, faktor kapasitas individual dalam organisasi tersebut, dan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode literatur revidu yang mengaji teori dan pengaruh antar variabel.

Safrizal & Fahlevi (2017) meneliti kinerja pelaksanaan anggaran dengan faktor variabel komitmen yang dimiliki organisasi, implementasi *e-monitoring* oleh manajemen atas pelaksanaan anggarannya, dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Penelitian mereka menggunakan metode regresi linear berganda. Ferdinan et al. (2020) melakukan penelitian terkait kinerja penyerapan anggaran satuan kerja dengan variabel eksogen yaitu perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pada penelitian tersebut, Ferdinan et al. (2020) menggunakan variabel moderasi komitmen organisasi dengan regresi linear berganda sebagai metode pengukurannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya perencanaan anggaran yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan mengukur kinerja pelaksanaan anggaran dengan menggunakan metode yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memulai mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Setelah data kuesioner terisi dan terkumpul, peneliti melakukan *cleansing* data untuk diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian atas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan pengukuran *structural equation model* dengan basis pendekatan *partial least square* atau sering disebut SEM-PLS. Adapun lokus penelitian berfokus pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.

TINJAUAN LITERATUR

Makna kinerja pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; dan kemampuan kerja (tentang peralatan).

Fauzi & Nugroho (2020) mendefinisikan bahwa kinerja atau *performance* atau dengan kata lain prestasi kerja merupakan penampilan kerja atau hasil kerja capaian seseorang. Definisi tersebut menjadi dasar penilaian kinerja karyawan secara personal atau organisasi tempat kerja karyawan bersangkutan. Kinerja tersebut mencerminkan kemampuan atau kapasitas karyawan terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Fauzi & Nugroho (2020) menambahkan bahwa kinerja seseorang atau organisasi ditentukan oleh tingginya kualitas dan kuantitas hasil kerja orang atau organisasi tersebut. Sementara itu, Nurdianto (2018) mendefinisikan kinerja sebagai ilustrasi atau gambaran hasil yang dicapai atas terlaksananya suatu program atau kegiatan atau penerapan kebijaksanaan sebagai manifestasi sasaran yang ditetapkan, tujuan yang ingin diraih, dan visi misi yang diemban organisasi. Kementerian Keuangan RI (2023b) memberikan definisi kinerja sebagai sebuah prestasi kerja yang telah dilaksanakan atau capaian *output* dari hasil suatu program atau kegiatan yang diukur dengan menggunakan satuan kuantitas dan kualitas yang terukur. Selanjutnya, Ferdinan et al. (2020) menyatakan pelaksanaan anggaran sebagai upaya atau kegiatan satuan kerja untuk mewujudkan realisasi atas perencanaan anggaran yang disusun sebelumnya. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan dari siklus APBN dimana sumber daya atau anggaran yang dialokasikan digunakan untuk melaksanakan kebijakan, kegiatan, atau program yang telah disusun, dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja pelaksanaan anggaran dapat dimaknai sebagai hasil atau capaian kerja atas penggunaan anggaran berdasarkan penyelesaian pelaksanaan kebijakan, kegiatan, atau program yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor PMK-62/PMK/2023 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja, menyebutkan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan menggunakan metode pengukuran kuantitatif. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ditujukan untuk meningkatkan tata kelola proses pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan RI menggunakan tiga aspek indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut mulai dari sisi perencanaan hingga hasil pelaksanaan kegiatan. Aspek pertama yaitu mengenai pengukuran kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Aspek kedua, pengukuran terhadap kualitas atas pelaksanaan anggaran. Aspek terakhir yaitu pengukuran terhadap kualitas hasil atas pelaksanaan anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022) mengatur indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran mencakup revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada aspek kualitas atas pelaksanaan anggaran mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Indikator kinerja pelaksanaan

anggaran pada aspek kualitas hasil atas pelaksanaan anggaran yaitu capaian *output*. Gagola et al. (2017) melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pada penelitiannya, Gagola et al. (2017) menggunakan beberapa faktor yang diuji dalam pengukuran penyerapan anggaran. Beberapa faktor tersebut antara lain perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah, pelaksanaan atas anggaran yang dikelola satuan kerja, proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan, dan terakhir faktor komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Selanjutnya, Anasta & Purwadi (2020) melakukan penelitian atas capaian realisasi anggaran. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu sistem anggaran berbasis kinerja, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan satuan kerja, perencanaan anggaran yang telah dilakukan, dan sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja. Kuntadi & Puspita (2022) juga melakukan penelitian tentang kinerja pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan K/L. Pada penelitiannya beberapa faktor-faktor yang digunakan untuk memprediksi adanya pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran antara lain variabel independen seperti faktor individual, dukungan organisasi, dan sistem pengukuran kinerja. Shalikhah (2014) mengukur kinerja anggaran pemerintah Kota Salatiga menggunakan beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, komitmen organisasi, dan tekanan eksternal.

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu maka penelitian ini mengukur kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan variabel independen pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa yang dilakukan satuan kerja, dan berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhinya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2018) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dari tahapan penentuan atau penetapan kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan organisasi atau lembaga hingga tahapan penyerahan atas barang atau jasa hasil pekerjaan. Argiya (2018) memberikan pengertian pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan K/L atau perangkat Pemerintah Daerah terkait pengadaan atas barang atau jasa yang diperlukan atau dibutuhkan dengan biaya kegiatan pengadaan berasal dari sumber dana APBN/APBD. Proses pengadaan barang dan jasa sendiri dimulai sejak penetapan kebutuhan barang atau jasa hingga serah terima atas barang/jasa dari hasil pekerjaan. Adapun tujuan pengadaan barang/jasa menurut Argiya (2018) antara lain setiap uang yang dibelanjakan pemerintah untuk mendapatkan barang atau jasa yang tepat, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri, meningkatkan keterlibatan peran industri kreatif, memperbanyak keterlibatan peran berbagai usaha UMKM, mendukung pelaksanaan hasil penelitian para peneliti dalam negeri dan memperbanyak penggunaan barang/jasa yang diproduksi dari penelitian, meningkatkan peran perilaku

nasional, mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mendukung upaya pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan menjadi mudah apabila perencanaan dan anggaran dilakukan secara optimal. Ferdinan et al. (2020) menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan secara optimal akan memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setiap organisasi harus melakukan penetapan sasaran program yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran, dengan cara tersebut maka organisasi akan lebih mudah mencapai target kinerjanya. Untuk memastikan target kinerja tercapai, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja atau organisasi harus mengikuti perencanaan dan penganggaran yang dibuat atau ditetapkannya.

Dalam pelaksanaan anggaran, seringkali faktor eksternal atau lingkungan eksternal organisasi memberi dampak bagi pelaksanaan anggaran. Yendrawati (2013) menyatakan bahwa segala sesuatu yang memengaruhi secara langsung terhadap organisasi dan berasal dari luar organisasi merupakan lingkungan eksternal suatu organisasi. Variabel luar organisasi yang dapat memengaruhi kondisi organisasi dapat berupa tren lingkungan sosial yang sedang terjadi, tekanan umum yang diterima organisasi, atau faktor-faktor spesifik lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan atau operasionalisasi internal dari lingkungan kerja organisasi tersebut. Beberapa variabel lingkungan eksternal tersebut dapat menjadi ancaman

ataupun menjadi peluang bagi perusahaan. Perusahaan tidak dapat mengendalikan sebagian besar variabel-variabel tersebut namun berbagai variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan para manajer atau pimpinan perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan tinjauan literatur maka hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut:

Hipotesis 1: pengadaan barang jasa memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hipotesis 2: pengadaan barang jasa memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Hipotesis 3: faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Hipotesis 4: pelaksanaan kegiatan memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Hipotesis 5: pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengukur kinerja pelaksanaan anggaran melalui pendekatan kuantitatif. Hermawan (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian memiliki sifat objektif, induktif, dan ilmiah. Metode ini menggunakan pernyataan-pernyataan yang dinilai atau dapat berupa angka-angka data penelitian yang kemudian pernyataan atau data tersebut dianalisis dengan pendekatan statistik. Populasi penelitian yaitu seluruh pejabat pengelola keuangan satuan kerja K/L berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sampel yang digunakan bersifat *purposive sampling* yaitu sampel dipilih

dengan kriteria pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja yang memiliki pagu jenis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Data primer dari responden dikumpulkan secara langsung. Responden merupakan pejabat/pegawai yang berperan sebagai pengelola keuangan pada satuan kerja terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara, dan staf pengelola keuangan. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh para pengelola keuangan sebanyak 162 responden yang berasal dari 132 satker dengan sebaran pada 29 K/L dan pagu yang dikelola satker asal responden mencapai sebesar Rp9,54 triliun. Adapun sebaran populasi responden berasal dari 184 satker yang tersebar pada 31 K/L dengan mengelola pagu mencapai Rp11,19 triliun.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan beberapa variabel. Variabel pengukur kinerja pelaksanaan anggaran (KPA) terdiri atas variabel pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelaksanaan kegiatan (PK), dan faktor eksternal (FE). Variabel KPA diukur menggunakan indikator kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan. Variabel PBJ diukur menggunakan indikator intensitas pelaksanaan PBJ, kemudahan penyedia barang/jasa, penyelesaian PBJ tepat waktu, intensitas penggunaan PBJ melalui *e-katalog/market place*, dan ketersediaan barang/jasa. Variabel PK diukur menggunakan indikator kesesuaian pembayaran tagihan dengan RPD bulanan, prestasi penyedia barang/jasa, koordinasi bagian keuangan dengan rencana kegiatan, ketepatan waktu penyampaian bukti

pengeluaran, dan keterkaitan pelaksanaan pekerjaan satu dengan pekerjaan/kegiatan lainnya. Variabel FE diukur menggunakan indikator pengaruh kenaikan harga BBM, kemudahan akses lokasi kegiatan, kualitas jaringan internet, kondisi kahar, dan pengaruh cuaca terhadap pelaksanaan kegiatan. Setiap pernyataan pada indikator masing-masing dinilai menggunakan skala *likert*. Penelitian ini menggunakan Indeks angka 1 sampai 5. Angka 1 pada survei yang digunakan menunjukkan makna sangat tidak setuju kemudian angka naik gradasi hingga angka 5 yang menunjukkan sangat setuju.

Muhson (2022) menyatakan bahwa SEM yang digunakan untuk pengukuran model merupakan metode yang digunakan untuk analisis statistik multivariat sebagai salah satu pengembangan dari regresi dan analisis jalur yang digunakan. Harahap (2020) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan bersamaan yang dilakukan dalam SEM. Ketiga kegiatan tersebut terdiri atas pertama, pemeriksaan uji validitas dan reliabilitas instrumen atau disebut *confirmatory factor analysis*, kedua, uji *path analysis* atau pengujian model hubungan antara variabel, dan ketiga, analisis model struktural dan analisis regresi bertujuan untuk mendapatkan model yang cocok untuk prediksi model yang dibangun.

Penelitian kinerja pelaksanaan anggaran diukur menggunakan *software* Smart PLS Versi 3. Menurut Harahap (2020) pada SMART PLS terdapat fungsi perhitungan utama yang dilakukan peneliti ketika melakukan olah data penelitian. Fungsi pada SMART PLS yang digunakan yaitu fungsi perhitungan PLS

Algorithm, *Bootstrapping*, dan *Blindfolding*. Ketiga fungsi tersebut digunakan untuk menguji nilai validitas, reliabilitas, dan kesesuaian model dalam penelitian serta menguji hubungan antar variabel penelitian. Pada fungsi *Algorithm* menu yang digunakan pada fungsi ini yaitu *outer loading*, *construct reliability and validity*, *discriminant validity*, dan *model fit*. Pada fungsi *bootstrapping*, menu yang digunakan yaitu *path coefficients* dan *specific indirect effects*, sedangkan pada fungsi *blindfolding*, menu yang digunakan yaitu *construct crossvalidated redundancy*. Menu pada fungsi tersebut digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator variabel atau *outer model*, menguji signifikansi pengaruh atau *inner model*, dan menguji tes kecocokan model atau *Goodness of fit model*. Ghazali (2018) menyatakan bahwa variabel dinyatakan valid apabila nilai *alphanya* di atas 0,5 sedangkan variabel dinyatakan reliabel apabila nilai signifikansinya berada di atas 0,7.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Outer Model

a. *Outer Loading*

Hasil penghitungan *outer loading* ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai indikator faktor eksternal lebih dari 0,7 yang menunjukkan indikator yang dipakai sebagai variabel faktor eksternal memenuhi persyaratan *convergent validity*. Demikian pula indikator kinerja pelaksanaan anggaran, indikator pengadaan barang jasa, dan indikator pelaksanaan kegiatan mempunyai nilai indeks lebih dari 0,7, maka dapat diambil kesimpulan variabel kinerja pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, dan

Tabel 1 Nilai *Outer Loading*

	FE	KPA	PBJ	PK
FE1	0,780			
FE2	0,733			
FE3	0,774			
FE4	0,733			
KPA1		0,966		
KPA2		0,964		
PBJ1			0,789	
PBJ2			0,896	
PBJ3			0,847	
PK1				0,748
PK2				0,849
PK3				0,806
PK4				0,825

Sumber: Diolah peneliti

pelaksanaan kegiatan telah memenuhi persyaratan *convergent validity*.

b. *Construct Reliability dan Validity*

Nilai AVE masing-masing variabel pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, faktor eksternal, dan kinerja pelaksanaan anggaran berurutan adalah 0,715; 0,653; 0,571; dan 0,931 (Tabel 2). Hasil pengukuran keseluruhan variabel menunjukkan nilai tingkat AVE lebih besar dari alfa 0,5. Hasil nilai yang lebih besar, menunjukkan bahwa variabel yang digunakan bernilai valid. Kevalidan variabel didukung data pada Tabel 3 yang menyajikan nilai akar AVE mempunyai nilai lebih besar dibanding dengan nilai koefisien korelasi antar variabel (lihat pada kotak diagonal). Hal

ini menunjukkan seluruh variabel pada model mempunyai tingkat yang baik dalam uji *Discriminant Validity*.

c. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* seperti pada Tabel 2. Estimasi reliabilitas variabel konstruk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, dan faktor eksternal memiliki nilai > 0,7. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil yaitu variabel yang dikembangkan dalam model mempunyai reliabilitas yang baik karena nilai tingkat *internal consistency reliability* yang dimiliki bernilai baik. Nilai *Cronbach's Alpha* ketiga konstruk > 0,7 semakin memperkuat tingkat reliabilitas variabel. Dengan demikian model yang terbentuk tidak ditemukan adanya permasalahan reliabilitas. Setelah memenuhi validitas dan reliabilitas maka dapat dilanjutkan kepada tahapan pengujian selanjutnya.

2. Pengujian *Goodness of fit model*

Pada SMART PLS, fungsi *Blindfolding* dapat menghasilkan nilai Q^2 *predictive relevance* dan nilai SRMR yang dihasilkan dari menu *model fit*. Nilai hasil Q^2 *predictive relevance* digunakan untuk analisis pengukuran tingkat relevansi prediksi atas pembentukan sebuah

Tabel 2 Hasil Uji *Construct Reliability and Validity*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
PBJ	0,800	0,882	0,715
PK	0,822	0,883	0,653
FE	0,765	0,842	0,571
KPA	0,925	0,964	0,931

Sumber: Diolah peneliti

model konstruk. Analisis penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat relevansi prediksi pada SMART PLS inilah yang disebut dengan *Blindfolding*. Nilai hasil Q^2 tersebut yang digunakan pada proses analisis. Apabila nilai $Q^2 > 0,05$ diambil disimpulkan bahwa model konstruk yang dibentuk mempunyai hubungan yang relevan. Hal ini berarti penggunaan variabel-variabel eksogen pada penelitian sudah tepat digunakan untuk menentukan tingkat relevansi prediksi variabel endogen.

Menunjuk Tabel 4, terlihat indeks nilai Q^2 variabel endogen kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 0,306 dan pelaksanaan kegiatan sebesar 0,252. Kedua variabel menunjukkan nilai $Q^2 > 0,05$. Dengan hasil tersebut maka model konstruk pada penelitian ini disimpulkan sudah relevan. Model konstruk variabel eksogen yang ada sudah representatif untuk menentukan tingkat nilai prediksi variabel endogen.

Model Fit digunakan sebagai penilaian layak tidaknya model dan data dalam pengujian pengaruh variabel (Muhson, 2022). Model dinyatakan layak dengan syarat nilai SRMR harus $< 0,10$. Hasil tes uji *model fit* menggunakan nilai SRMR sesuai pada Tabel 5. Nilai SRMR *estimated model* yang dihasilkan dari pengukuran model konstruk adalah sebesar 0,084. Nilai SRMR tersebut menunjukkan nilai $< 0,10$. Maka dari itu, model konstruk yang dibangun dapat disimpulkan layak digunakan untuk pengujian pengaruh variabel eksogen yang diberikan terhadap variabel endogen. Hasil konstruk model penelitian ini ditunjukkan sesuai dengan Gambar 1.

3. Pengujian *inner model*

Tabel 3 Nilai <i>Discriminant Validity</i>				
	PBJ	PK	FE	KPA
PBJ	0,845			
PK	0,631	0,808		
FE	0,263	0,261	0,755	
KPA	0,462	0,637	0,198	0,965

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 4 Nilai Q^2			
	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$
FE	648,0	648,0	
KPA	324,0	204,7	0,368
PBJ	486,0	486,0	
PK	648,0	484,6	0,252

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 5 Nilai SRMR pada Model Fit		
	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0,081	0,084

Sumber: Diolah peneliti

Uji tes *inner model* penelitian ini menggunakan *output* pengujian *bootstrapping*. Pengujian ini berguna untuk mengukur seberapa besar variabel eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen (Muhson, 2022). Dengan kata lain pengujian *inner model* merupakan uji signifikansi model. Pengujian melalui *bootstrapping* memberikan hasil *path coefficients*. Hasil *path coefficients* dari pengujian *bootstrapping* ditunjukkan pada Tabel 6.

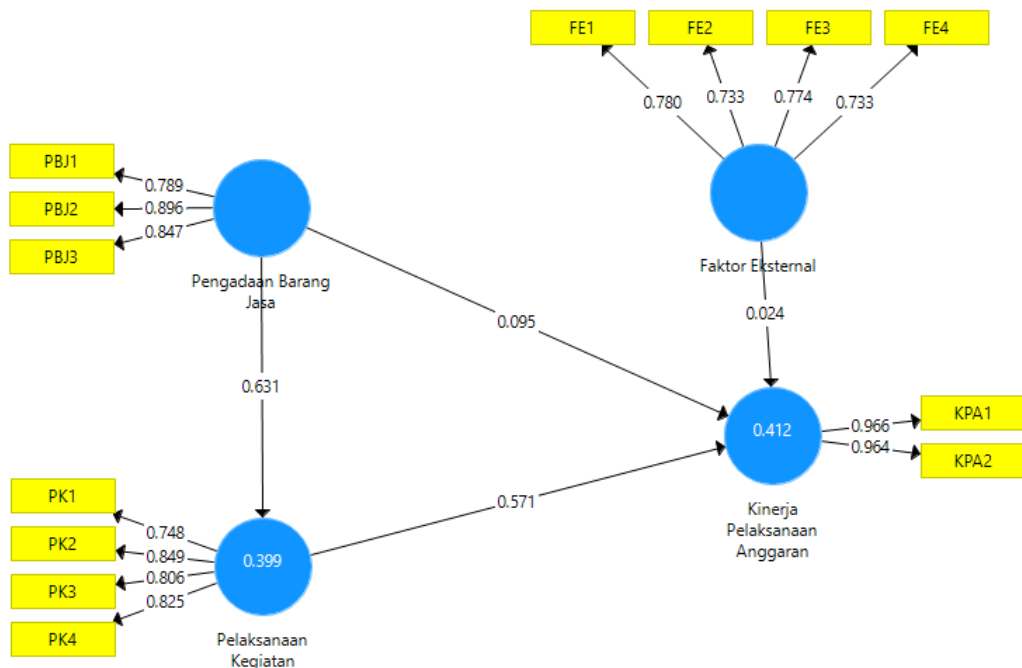
Arah hubungan variabel yang ada ditunjukkan oleh nilai hasil *Path coefficients*. Arah hubungan variabel tersebut dapat menunjukkan searah (positif) atau arah sebaliknya (negatif). Nilai hasil *Path coefficients* berada pada rentang -1 sampai dengan 1. Apabila nilai hasil *Path coefficients* berada pada rentang 0 sampai 1 maka arah hubungan variabel bernilai positif.

Apabila nilai hasil *Path coefficients* berada pada rentang -1 sampai 0 maka arah hubungan variabel bernilai negatif. Menunjuk Tabel 6 terlihat nilai *P Values* variabel eksogen pengadaan barang jasa terhadap pelaksanaan kegiatan memiliki nilai 0,000, nilai *P Values* variabel pengadaan barang jasa terhadap variabel kinerja pelaksanaan anggaran memiliki nilai 0,256, nilai *P Values* variabel faktor eksternal terhadap variabel kinerja pelaksanaan anggaran memiliki nilai 0,736, nilai *P Values* variabel pelaksanaan kegiatan terhadap variabel kinerja pelaksanaan anggaran mempunyai nilai 0,000. Maka dari itu, hubungan variabel eksogen pengadaan barang jasa terhadap variabel pelaksanaan kegiatan mempunyai arah positif. Demikian pula arah hubungan variabel eksogen pengadaan barang jasa, pelaksanaan

kegiatan dan faktor eksternal terhadap variabel kinerja pelaksanaan anggaran adalah positif.

Untuk melakukan pengujian hipotesis pertama penelitian ini yakni dugaan apakah pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, dengan menunjuk Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien *P Values* sebesar 0,000. Nilai *P values* pengadaan barang jasa terhadap pelaksanaan kegiatan $< 0,05$. Untuk itu kesimpulan hipotesis pertama dapat diterima. Nilai koefisien variabel eksogen pengadaan barang jasa sebesar 0,631 berarti bahwa setiap perubahan satu satuan variabel pengadaan barang jasa maka memberi pengaruh 0,631 terhadap pelaksanaan kegiatan dengan kondisi *ceteris paribus* indikator lainnya. Dengan *P Values* sebesar 0,000 dan nilai koefisien 0,631, maka pengadaan

Gambar 1 Skema Model Penelitian



Sumber: Diolah peneliti

barang jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pengujian hipotesis kedua melihat dugaan pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien *P Values* sebesar 0,256. Nilai *P values* pengadaan barang jasa terhadap kinerja pelaksanaan anggaran > 0,05. Dapat disimpulkan hipotesis kedua tidak dapat diterima atau ditolak. Nilai koefisien variabel eksogen pengadaan barang jasa sebesar 0,095 berarti bahwa setiap perubahan satu satuan variabel pengadaan barang jasa maka memberi pengaruh 0,095 terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dengan kondisi *ceteris paribus* indikator lainnya. Dengan *P Values* sebesar 0,256 dan nilai koefisien 0,095 maka pengadaan barang jasa memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Pengujian hipotesis ketiga yaitu dugaan faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien *P values* sebesar 0,736. Nilai *P Values* faktor eksternal terhadap kinerja pelaksanaan anggaran > 0,05. Dapat disimpulkan hipotesis ketiga tidak diterima atau ditolak. Nilai koefisien variabel eksogen faktor eksternal

sebesar 0,024 berarti bahwa setiap perubahan satu satuan variabel faktor eksternal memberi pengaruh 0,024 terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dengan kondisi *ceteris paribus* indikator lainnya. Dengan *P Values* sebesar 0,736 dan nilai koefisien 0,024 maka faktor eksternal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Pengujian hipotesis keempat yaitu dugaan pelaksanaan kegiatan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien *P Values* sebesar 0,000. Nilai *P Values* faktor eksternal terhadap kinerja pelaksanaan anggaran < 0,05. Dapat disimpulkan hipotesis keempat dapat diterima. Nilai koefisien variabel eksogen pelaksanaan kegiatan sebesar 0,571 berarti bahwa setiap perubahan satu satuan variabel pelaksanaan kegiatan memberi pengaruh 0,571 terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dengan kondisi *ceteris paribus* indikator lainnya. Dengan *P Values* sebesar 0,000 dan nilai koefisien 0,571 maka pelaksanaan kegiatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Pengujian hipotesis kelima yaitu dugaan pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan mempunyai

Tabel 6 Nilai *Path Coefficients*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Value</i>
PBJ → PK	0,631	0,633	0,057	11,058	0,000
PBJ → KPA	0,095	0,096	0,083	1,137	0,256
FE → KPA	0,024	0,048	0,072	0,337	0,736
PK → KPA	0,571	0,565	0,086	6,629	0,000

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 7 Hasil Specific Indirect Effects

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Value</i>
PBJ → PK → KPA	0,361	0,358	0,067	5,378	0,000

Sumber: Diolah peneliti

pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Menunjuk pada Tabel 7 diketahui koefisien *P Values* sebesar 0,000. Nilai *P values* pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran $< 0,05$. Dapat disimpulkan hipotesis kelima dapat diterima. Nilai koefisien variabel eksogen pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan sebesar 0,361 berarti bahwa setiap perubahan satu satuan variabel pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan kegiatan memberi pengaruh 0,361 terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dengan kondisi *ceteris paribus* indikator lainnya.

Pada Tabel 8 terlihat nilai *R square* atas variabel eksogen pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan, dan faktor eksternal terhadap kinerja pengadaan barang yaitu 0,412. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan, dan faktor eksternal memberikan nilai pengaruh sebesar 41,2% terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Sementara variabel lain yang memberikan pengaruh atas kinerja pelaksanaan anggaran berada di luar variabel eksogen yang digunakan dalam pengukuran ini.

Tabel 8 Nilai *R Square*

	<i>R Square</i>
KPA	0,412

Sumber: Diolah peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel endogen kinerja pelaksanaan anggaran hanya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel eksogen pelaksanaan kegiatan. Pada variabel eksogen faktor eksternal dan pengadaan barang jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, namun variabel eksogen pengadaan barang jasa melalui pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Kondisi tersebut dapat dipahami karena pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian tahapan pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, proses pengadaan barang dan jasa juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, satuan kerja agar melaksanakan proses pengadaan barang jasa secara efektif dan akurat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya. Dengan hasil penelitian bahwa kinerja pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, maka satuan kerja agar segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA yang dikelolanya. Pelaksanaan kegiatan seyogyanya dilaksanakan sesegera mungkin atau dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan tidak

menunda pelaksanaan kegiatan hingga mendekati akhir tahun anggaran.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Indikator variabel eksogen dan endogen pada penelitian ini telah disesuaikan dengan kaidah penelitian sehingga indikator yang layak dan reliabel saja yang digunakan. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan lagi indikator-indikator lain yang dapat menjelaskan hubungan variabel eksogen dan endogen. Penelitian ini mengambil lokus satuan kerja di Kalimantan Timur. Penelitian kinerja selanjutnya dapat dilakukan terhadap satuan kerja secara regional atau nasional. Selain itu, pada penelitian ini variabel eksogen pengadaan barang jasa tidak memiliki pengaruh signifikan, kemungkinan indikator konstruk model variabel tersebut perlu penambahan agar dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda.

REFERENSI

- Anasta, L., & Purwadi, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian realisasi anggaran pada satuan kerja rumah penyimpanan benda sitaan negara di wilayah Jakarta Barat. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 208–216.
- Argiya, V.S.M.P. (2018). *Pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*. Palangka Raya: BPK.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2019). *Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LAPKIN)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Fauzi, A., & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117-134.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 108-117.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, L. K., & Pd, M. (2020). Analisis SEM (structural equation modelling) dengan SMARTPLS (partial least square). *Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang*, 1(1), 1-11.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif,*

- kuantitatif dan mixed method). Kuningan: Hidayatul Quran.
- Kementerian Keuangan (2023a). *Informasi APBN 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2023b). *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 63/PMK/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi publik serta fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8), 1-17.
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga: Sistem pengukuran kinerja, dukungan organisasi dan faktor individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 189-198.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Jakarta: LKPP.
- Muhson, A. (2022). *Analisis statistik dengan SmartPLS: Path Analysis, Confirmatory Factor Analysis, & Structural Equation Modeling*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurdianto. (2018). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Medan*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Safrizal, D., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh pemanfaatan elektronik-monitoring pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada kantor kementerian agama dalam wilayah Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(1), 67-76.
- Shalikhah, L. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran pada pemerintahan Kota Salatiga (Disertasi)*. Universitas Kristen Satya Wacana. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/5070>
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal akuntansi dan auditing indonesia*, 17(2), 166-175